

**ANALISIS KONDISI KESEHATAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH DI KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI



**NAMA : BAGUS PRASETYO
NIM : 222016020**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2021**

SKRIPSI

**ANALISIS KONDISI KESEHATAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH DI KOTA PALEMBANG**

**Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi**



**NAMA : BAGUS PRASETYO
NIM : 222016020**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2021**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bagus Prasetyo

NIM : 222016020

Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Judul Skripsi : Analisis Kondisi Kesehatan Keuangan Pemerintah Daerah Di Kota Palembang

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana Strata 1 baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, 01 Februari 2021

Yang Menyatakan,



Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Analisis Kondisi kesehatan Keuangan Pemerintah Daerah
Di Kota Palembang
Nama : Bagus Prasetyo
NIM : 222016020
Faakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal, 06 februari 2021

Pembimbing I,



Drs. Sunardi, S.E., M.Si
NIDN/NBM :0206046303/784021

Pembimbing II,



Welly, S.F., M.Si
NIDN/NBM: 0212128202/1085022

Mengetahui
Dekan
Kecamatan Program Studi Akuntansi



Dek, S.E., M.Si, AK., CA
NIDN/NBM: 0216106902/944806

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

- “ *Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim “ (HR, Ibnu Adi dan Baihaqi dari anas).*
- “ *Katakan pada hatimu kalau takut gagal justru lebih buruk dari kegagalan itu sendiri”*

Terucap pada MU Allah SWT.

Kupersembahkan untuk:

- *Papa dan Mamaku Tercinta*
- *Adekku Tersayang*
- *Dosen Pembimbing*
- *Dosen - Dosen FEB UMP*
- *Almamaterku*



PRAKATA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan berjudul “**Analisis Kondisi Kesehatan Keuangan Pemerintah Daerah Di Kota Palembang**” yang peneliti dapat selesaikan sebagaimana waktu yang dijadwalkan.

Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada orang tuaku Bapakku Misyatno dan Mamakku Sri Novita beserta Adikku Muhammad Rafi Ramadhan dan Ahmad Faari ktavian atas do'a dan kasih sayang yang berlimpah, semangat dan selalu memberikan motivasi. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Drs. Sunardi S.E., M.Si selaku pembimbing I dan Ibu Welly, S.E., M.Si selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, semangat, dan saran-saran dengan ikhlas dan penuh kesabaran kepada peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini. Selain itu disampaikan juga terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini, dan tak lupa juga peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, S.E., MM selaku Rektor beserta staf dan karyawan Universitas Muhammadiyah Palembang.

2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan, M.M selaku Dekan beserta staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Betri Sirajuddin., S.E., Ak., M.Si., CA dan Ibu Nina Sabrina, S.E., M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Hj. Rosalina Ghazali, S.E., Ak., M.Si selaku pembimbing akademik penulis yang telah membimbing dari semester satu sampai dengan sekarang.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Kepada keluargaku tersayang terima kasih telah memberikan dorongan semangat dan do'a yang tulus.
7. Pegawai di Kantor BPKAD Kota Palembang yang telah memberikan izin penelitian sehingga selesainya penyusunan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan keterbatasan dalam penelitian ini, untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Palembang, Februari 2021
Peneliti

Bagus Prasetyo

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PRAKATA	vi
HALAMAN DAFTAR ISI	viii
HALAMAN DAFTAR TABEL	x
HALAMAN DAFTAR GAMBAR	xi
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II. KAJIAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	10
1. Laporan Keuangan Pemerintah	10
a. Pengertian Laporan Keuangan Pemerintah	10
b. Pentingnya Laporan Keuangan Pemerintah	11
c. Tujuan Pelaporan Keuangan Pemerintah	13
d. Manfaat Pelaporan Keuangan Pemerintah	19
e. Unsur-Unsur Laporan Keuangan Pemerintah	21
f. Prinsip Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah	27
2. Kondisi Keuangan	28
a. Pengertian Kondisi Keuangan	28
b. Aspek-Aspek Yang Mencakup Kondisi Keuangan Pemerintah	29
c. Pengertian Rasio Keuangan Pemerintah	30
d. Keunggulan Analisis Rasio Keuangan	31
B. Penelitian Sebelumnya	34
BAB III. METODELOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Lokasi Penelitian	38
C. Operasionalisasi Variabel.....	38

D. Data yang Diperlukan	38
E. Metodologi Pengumpulan Data	39
F. Analisis Data dan Teknik Analisis	40
1. Analisis Data	40
2. Teknik Analisis Data	41
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	42
1. Gambaran Umum Kota Palembang	42
2. Gambaran Umum BPKAD Kota Palembang	43
3. Kondisi Keuangan Kota Palembang	46
a. Gambaran Umum Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2016 – 2019	46
B. Pembahasan Hasil Penelitian	49
1. Kondisi Keuangan Kota Palembang Tahun 2016 - 2019	50
a. Analisis Solvabilitas Jangka Pendek	50
b. Analisis Solvabilitas Jangka Panjang	52
c. Solvabilitas Operasional	53
d. Fleksibilitas Keuangan	55
e. Analisis Solvabilitas Layanan	56
f. Analisis Kemandirian Keuangan	58
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
A. Simpulan	61
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Data Keuangan Pemerintah Kota Palembang Tahun 2016 - 2019	6
Tabel II.1	Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya	36
Tabel III.1	Operasionalisasi Variabel	38
Tabel IV.1	Persentase Realisasi Dan Tercapainya Pendapatan, Belanja Dan Transfer, Serta PAD Tahun 2016 - 2019	46
Tabel IV.2	Pertumbuhan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Kota Palembang Tahun 2016 - 2019	48
Tabel IV.3	Rasio Solvabilitas Jangka Pendek Kota Palembang Tahun Pelaporan 2016 - 2019	50
Tabel IV.4	Rasio Solvabilitas Jangka Panjang Kota Palembang Tahun Pelaporan 2016 - 2019	52
Tabel IV.5	Rasio Solvabilitas Operasional Kota Palembang Tahun Pelaporan 2016 - 2019	53
Tabel IV.6	Rasio Fleksibilitas Keuangan Kota Palembang Tahun Pelaporan 2016 - 2019	55
Tabel IV.7	Rasio Solvabilitas Layanan tahun Pelaporan 2016 - 2019	57
Tabel IV.8	Rasio Kemandirian Keuangan Tahun Pelaporan 2016-2019....	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1	Bagian Struktur Organisasi BPKAD Kota Palembang	45
Gambar IV.2	Grafik Rasio Solvabilitas Jangka Pendek	52
Gambar IV.3	Grafik Rasio Solvabilitas Operasiona	54
Gambar IV.4	Grafik Rasio Fleksibilitas Keuangan	56
Gambar IV.5	Grafik Rasio Solvabilitas Layanan	58
Gambar IV.6	Grafik Rasio Kemandirian Keuangan	60

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Biodata Penulis

Lampiran 2 : Fotocopy Sertifikat AIK

Lampiran 3 : Fotocopy Sertifikat TOEFL

Lampiran 4 : Fotocopy Surat Keterangan Riset

Lampiran 5 : Fotocopy Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi

Lampiran 6 : Fotocopy Bebas Plagiat

Lampiran 7 : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palembang

ABSTRAK

Bagus Prasetyo / 222016020 / 2021 / Analisis Kondisi Kesehatan Keuangan Pemerintah Daerah di Kota Palembang

Tujuan untuk mengetahui Kondisi Kesehatan Keuangan Pemerintah kota Palembang setelah diukur dengan 6 dimensi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Deskriptif. Tempat penelitian dilakukan pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kota Palembang. Data yang digunakan yaitu data Sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Dokumen. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Teknik analisis yang digunakan dengan menggunakan 6 langkah teknik analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi kesehatan keuangan kota Palembang dilihat dari Solvabilitas Jangka Pendek buruk, Solvabilitas Jangka Panjang tidak ada kewajiban jangka panjang, Solvabilitas Operasional baik, Fleksibilitas Keuangan sangat baik, Solvabilitas Layanan sangat baik, Kemandirian Keuangan buruk.


Kata kunci : Laporan keuangan pemerintah, Kondisi keuangan

Abstract

Bagus Prasetyo / 222016020 / 2021 / Analysis of The Financial Condition of Local Government in Palembang

The purpose of this research was to monitor the Financial Condition of the local government in Palembang city after measured by 6 dimensions. The type of this research used descriptive research. The research was conducted at the local government financial office in Palembang. The data used was secondary. The technique of collecting the data was Document Analysis. The data analysis method used was quantitative analysis. Techniques in analyzing the data used 6 steps of data analysis techniques. The results showed that the financial condition of Palembang city could be seen from Short Term Solvency in the not good category, Long-Term Solvency was no long-term problem, Operational Solvency was good, Financial Flexibility was very good, Service Solvency was not good, Financial Independence was not good.

Keywords: Government Financial Statements, Financial Condition

NO	NAMA	NIM	KETERANGAN
A68	Bagus Prasetyo	222016020	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan akuntansi sektor publik khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era baru dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran. Pengelolaan keuangan sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu kota karena dapat menjadi suatu kota yang kuat serta mampu berkembang atau tidak, tergantung pada cara mengelola keuangannya.

Pemerintah pusat maupun daerah merupakan pihak yang diberi tugas untuk menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan layanan sosial kepada masyarakat dalam menjalankan tugas dan wewenang, diperlukan pembiayaan dengan memungut berbagai macam jenis pendapatan dari masyarakat, kemudian menjalankannya untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah dan pelayanan kepada masyarakat.

Kuangan Negara/daerah merupakan uang rakyat yang bersumber dari rakyat dan di pergunakan untuk rakyat. Pengelolaan keuangan Negara/daerah yang baik sangat penting agar uang Negara dapat dipergunakan dengan efektif dan efisien untuk pembangunan. Salah satu bentuk pengelolaan keuangan Negara yang baik adalah adanya pemberian kewenangan yang seimbang kepada pengelolaan keuangan Negara/daerah.

Menurut Khusaini (2018: 4) menjelaskan tentang fungsi pokok pemerintah daerah terdiri dari tiga hal, yakni fungsi alokasi, fungsi distribusi,

dan fungsi stabilisasi. Namun dalam proses penciptaan system pemerintahan yang lebih efektif dan efisien melalui desentralisasi daerah, sebagian besar wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat dilimpahkan di desentralisasikan kepada pemerintah daerah. Namun perlu diingat, tidak semua fungsi wewenang pemerintah daerah dalam mengatur perekonomian secara makro melalui kebijakan fiskal baik melalui pengeluaran pemerintah, perpajakan dan subsidi yang bersifat nasional.

Menurut Kawatu (2019: 7) menjelaskan bahwa pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan untuk mendukung pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik tersebut meliputi informasi yang digunakan untuk membandingkan kinerja keuangan actual dengan yang dianggarkan, menilai kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi, membantu menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan masalah keuangan dan ketentuan lainnya, serta membantu dalam mengevaluasi efisiensi dan efektifitas.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah adakah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Undang-undang No 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Keuangan daerah selain diatur dengan peraturan pemerintah juga mengikuti peraturan menteri dan keuangan daerah juga mengikuti anggaran pendapatan dan belanja daerah masing-masing daerah yang disinkronkan dan dikelola secara sistematis.

Menurut Pamungkas (2014:38) Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggung jawaban. Dari sisi tujuan, keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilik atau penguasa objek sebagaimana tersebut diatas dalam rangka penyelenggaraan pemerintah Negara.

Menurut Mahmudi (2019: 9) fungsi utama dari laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan tersebut akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Sebagaimana telah disinggung pada bagian awal penggunaan laporan

keuangan meliputi berbagai kalangan, baik yang dikategorikan sebagai pengguna internal maupun eksternal.

Ritonga (2014) mendefinisikan kondisi Keuangan Pemerintah Daerah (pemda) sebagai kemampuan keuangan pemda untuk memenuhi kewajiban pemda, mengantisipasi kegiatan yang tak terduga, dan untuk mengeksekusi keuangan secara efektif dan efisien yang diukur dengan enam dimensi yaitu: Solvabilitas Jangka Pendek yaitu kemampuan pemda untuk memenuhi kewajiban keuangan yang jatuh tempo dalam waktu 30 hari sampai 60 hari, Solvabilitas Jangka Panjang merupakan indikator kapasitas keuangan pemda dalam melunasi kewajiban jangka panjangnya, solvabilitas operasional merupakan kemampuan pemerintah dalam menghasilkan pendapatan untuk menutupi beban operasional, Fleksibilitas Keuangan merupakan kemampuan pemda untuk mengatasi kejadian yang tak terduga di masa yang akan datang, Kemandirian Keuangan menunjukkan kemampuan pemda untuk mengeksekusi hak-hak keuangan secara efektif dan efisien, Solvabilitas Layanan menunjukkan kapasitas keuangan pemda untuk menyediakan dan mempertahankan kualitas pelayanan publik yang dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Suryani, dkk (2016). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kabupaten/kota Aceh memiliki tingkat kondisi keuangan daerah yang lebih baik dari pada kabupaten/kota di Sumatera Utara atas rasio total pendapatan daerah/jumlah penduduk, rasio pajak daerah dan retribusi daerah/PDRB, dan rasio SiLPA tahun sebelumnya/belanja daerah,

sedangkan kabupaten/kota di Sumatera Utara memiliki tingkat kondisi keuangan daerah yang lebih baik dari pada kabupaten/kota di Aceh atas rasio belanja modal/total belanja daerah.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Nur (2017). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum pengelolaan keuangan di kota Magelang cukup baik dan menghasilkan kondisi keuangan dengan nilai indeks yang tinggi diantara kota-kota di klaster 3.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Putri dan Nurlia (2017). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemandirian pemerintah daerah kabupaten batu dalam memenuhi dana untuk penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan social masyarakat masih relative rendah sekali berdasarkan criteria penilaian kemandirian daerah menurut kependagri karena berada pada interval 0-25%.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Sukeksi dan Irawan (2017). Hasil penelitian ini adalah bahwa tingkat kemakmuran yang lebih tinggi, jumlah penduduk yang banyak, jumlah penduduk miskin lebih rendah, kepadatan penduduk lebih besar, belanja pegawai yang lebih rendah, upah minimum pekerja yang lebih tinggi, serta jumlah usia produktif yang lebih banyak cenderung mengalami kondisi keuangan yang lebih baik. Dan karakteristik sebaiknya akan membuat kondisi pemerintah daerah menjadi lebih buruk.

Kota Palembang merupakan Ibu Kota Provinsi Sumatera Selatan. Palembang adalah kota terbesar kedua di Sumatera setelah Medan. Kota dengan luas wilayah 400,61 km² ini dihuni oleh lebih dari 1,8 juta penduduk

pada tahun 2018. Kota Palembang sendiri memiliki 18 kecamatan dan memiliki 17 desa/kelurahan. Pembangunan LRT (Kereta Api Layang), dan direncanakan pembangunan sirkuit motor GP dikawasan Jakabaring dan sirkuit F1 di kawasan Tanjung Api-api merupakan proyek pembangunan Palembang terkini.

Table I.1
Data Keuangan Pemerintah Kota Palembang tahun 2016 - 2019

No	Keterangan	2016	2017	2018	2019
1	Kas dan setara kas	62.518.111.434,59	98.061.991.997	71.677.428.0301	55.393.868.730,
2	Investasi jangka pendek	-	-	-	-
3	Kewajiban lancar	359.875.455.662,66	131.905.496.224,45	332.813.159.181,77	308.618.179.180,30
4	Total aset tetap	5.775.059.817.107,22	11.797.058.242.180,80	12.496.295.686.158,42	11.523.675.156.231,80
5	Kewajiban jangka panjang	-	-	-	-
6	Total kewajiban	351.776.234.596,46	131.905.496.224,45	332.813.159.181,77	308.618.179.780,30
7	Total pendapatan	3.112.903.127.195,01	3.417.593.733.021,39	3.485.882.634.349,88	3.987.546.941.588,54
8	Pendapatan DAK	387.183.971.065	431.291.808.953	481.900.223.636	401.557.367.340
9	Total pendapatan LO	3.416.577.568.176,54	3.328.048.801.668,24	3.620.451.747.826,62	-
10	Pendapatan DAK LO	387.183.971.065,00	431.291.808.953,00	481.900.223.636,00	-
11	Total beban LO	2.748.194.348.911,59	2.545.722.157.105,63	3.067.314.006.206,08	-

12	Belanja pegawai	1.646.946.686.558	1.412.603.161.060	1.519.957.011.932	1.576.104.508.849
13	Total PAD	781.382.342.541,23	1.091.704.605.854,90	953.302.082.627,74	1.081.114.690.868,43
14	Jumlah penduduk	1.602.071	1.623.099	1.643.488	1.662.893

Sumber : BPKAD, 2021

Berdasarkan tabel I.2 dapat disimpulkan bahwa keuangan pemerintah daerah dari tahun 2016 sampai 2019 mengalami kenaikan dan penurunan kondisi keuangan. Dapat dilihat pada kas tahun 2016 sebesar Rp. 62.519.111.434,59, kas pada 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp. 98.061.991.997 kas pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp. 71.677.428.031 dan kas pada tahun 2019 mengalami penurunan lagi sebesar Rp. 55.393.868.730. Terdapat besarnya total kewajiban pada tahun 2016 yang dapat dilihat dari total kewajiban tahun 2016 sebesar Rp. 351.776.234.596,46 lalu pada tahun 2017 mengalami penurunan total kewajiban sebesar Rp. 131.905.496.224,45 tahun 2018 total kewajiban mengalami kenaikan kembali sebesar Rp. 332.813.159.181,77 dan tahun 2019 mengalami penurunan total kewajiban sebesar Rp. 308.618.179.780,30.

Kenaikan pada akun kewajiban itu disebabkan karena bertambahnya jumlah seluruh utang utang yang ada di pemerintah baik itu utang jangka panjang maupun jangka pendek, dan begitu pula sebaliknya apabila jumlah kewajiban mengalami penurunan itu disebabkan menurunnya jumlah seluruh utang-utang yang ada di pemerintah baik utang jangka panjang maupun jangka pendek.

Pada akun Pendapatan Asli Daerah di tahun 2016 sebesar Rp. 781.382.342.541,23 mengalami kenaikan di tahun 2017 menjadi Rp. 1.091.704.605.854,90 ditahun 2018 akun PAD mengalami penurunan menjadi Rp. 953.302.082.627,74 dan di tahun 2019 akun PAD mengalami kenaikan kembali menjadi Rp. 1.081.114.690.868,43. Kenaikan total PAD itu terjadi karena pemerintah mampu mengoptimalkan seluruh Pendapatan Asli Daerah yang ada di kota Palembang, sedangkan apabila total PAD mengalami penurunan itu karena kurang optimalnya usaha dari pemerintah dalam hal mengoptimalkan penghasilan yang ada di daerah kota Palembang.

Analisis rasio keuangan dalam penelitian ini digunakan sebagai tolak ukur dalam menilai kinerja keuangan jika dilihat dari 6 dimensi maka akan memberikan suatu hasil dari kinerja dar tahun-tahun sebelumnya, dimana nanti akan menggambarkan kondisi dari kinerja keuangan tersebut. Dan masih terbatasnya penelitian tentang kondisi kesehatan keuangan pemerintah kota Palembang dengan menggunakan 6 dimensi. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“Analisis Kondisi Kesehatan Keuangan Pemerintah Daerah Di Kota Palembang”**

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan uraian dari latar belakang diatas, permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kondisi kesehatan keuangan pemerintah Kota Palembang bila diukur dengan 6 dimensi ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi kesehatan keuangan pemerintah Kota Palembang setelah diukur dengan 6 dimensi.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak, diantaranya :

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan mengetahui kondisi kesehatan keuangan pemerintah Kota Palembang setelah diukur dengan 6 dimensi.

2. Bagi Pemerintah Kota Palembang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah Kota Palembang dalam melakukan penilaian kondisi kesehatan keuangan dengan 6 dimensi.

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan wawasan pengetahuan tentang penilaian kondisi kesehatan keuangan pemerintah Kota Palembang dengan 6 dimensi.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang.
- Bambang Pamungkas. 2013. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Pemerintah Daerah Konsep dan Praktek Berdasar Peraturan Perundangan*. Penerbit Kesatuan Press. Bogor, Jawa Barat. ISBN :978-602-7642-13-3.
- Faiz Zamzami, Mukhlis, dan Anissa Eka Pramesti. 2014. *Audit Keuangan Sektor Publik Untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Penerbit Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. ISBN : 979-420-837-X.
- Freddy Samuel Kawatu. 2019. *Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik*. Penerbit Deepublish CV Budi Utama. Yogyakarta. ISBN : 978-623-02-0357-2
- Halkadri Fitra. 2019. *Analisis Neraca Dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah*. Penerbit CV IRDH. Purwokerto, Malang. ISBN : 978-623-7343-30-1.
- Hartono. 2018. *Konsep Analisa Laporan Keuangan Dengan Pendekatan Rasio Dan SPSS*. Penerbit CV Budi Utama. Yogyakarta. ISBN : 978-602-475-506-5.
- Helmizar, Achmad Yugo Pidhegso, Fajri Ramadhan, Faqih Nur Huda, Slamet Dhul Fadli, dan Teuku Surya Darma. 2020. *Akuntanbilas Pengelolaan Keuangan Negara*. Penerbit Pusat Kajian Akuntanbilas Keuangan Negara Sekretariat Jendral & Badan Keahlian DPR RI. Jakarta. ISBN : 978-602-50017-5-8.
- Jan Hoesada. 2019. *Analisis Kondisi Ekonomi Pemerintahan*. Artikel Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Melalui Website : <https://www.ksap.org/sap/analisis-kondisi-ekonomi-pemerintahan/>
- Khusaini. Muhammada 2018. *Keuangan Daerah* . Penerbit UB Press
- Mahmudi , 2010. *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah*. Edisi ke 2 UPP STIK YKPN. Yogyakarta
- Moernahadi S. Djanegara. 2017. *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Penerbit Kesatuan Press. Bogor. ISBN : 978-602-76423-4-8.

Nur Afiah Maizunati. 2017. *Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang Dalam Klaster Kota Di Jawa-Bali*. Jurnal Riset Akuntansi Keuangan. Volume 2 No.2. April 2017.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Putri Kemala Dewi Lubis. 2017. *Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu Tahun Anggaran 2011-2013*. Jurnal Kitabah. Volume 1 No. 1. Januari - Juni 2017.

Sukeksi Hastaningrum, dan Irwan Taufiq Ritonga. 2016. *Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa Tahun 2011-2015*. Jurnal Accounting And Business Information sytems Journal. ISSN : 2302-1500 (online). Vol. 4 No. 4.

Suryani, Hasan Basri, dan Faisal. 2016. *Analisis Kondisi Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Di Aceh Dan Di Sumatera Utara*. Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE). ISSN : 1412-3126. Vol. 23, No. 1, Maret 2016, Hal. 63-71.

Tulisan Hukum Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. *Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

V Wiratna Sujarweni. 2019. *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Penerbit Pustaka Baru Press. Yogyakarta.